



Pengaruh Pemberian Subsidi BBM Solar terhadap Peningkatan Persepsi Keuntungan Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Aceh Barat

Muhaymin

Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 09 November 2022

Revised: 15 Januari 2023

Accepted: 20 Januari 2023

KEYWORDS

Subsidi, Disperindag, Logistic Regression

CORRESPONDENCE

E-mail: muhaymin871@gmail.com

ABSTRACT

Diesel subsidies are very important for Micro, Small, and Medium Enterprises in the West Aceh Region. This area is a center of agriculture and industry which is experiencing difficulties where everything depends on income in terms of agriculture and fisheries. These two processes are currently very much underpinning production machines driven by diesel-powered e-engines. The purpose of this research is to see how far the perception of the recipient of the subsidy is in receiving the subsidy itself. The 63 samples for this study were taken from the database of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) receiving diesel subsidies owned by the West Aceh District Industry and Trade Agency. From the results of the dissemination it is known that the subsidies given are still considered insufficient and need to be increased and the subsidy recipients state the amount of their income as the basis of the benefits they received.

PENDAHULUAN

Subsidi solar menjadi sangat penting untuk para pelaku usaha mikro di Kabupaten Aceh Barat utamanya yang membidangi bidang jasa penggilingan padi. Usaha penggilingan padi sendiri dianggap penting sebagai industri penyokong utama di wilayah rural-agraris. Kabupaten Aceh Barat merupakan sebuah kabupaten yang titik industrinya berada pada sektor agrikultur dan marine industri. Penggunaan mesin industri dalam proses ekstraksi beras dari gabah padi sudah lama digalakkan menggantikan proses yang sama yang dijalankan dengan tenaga manusia. Mesin industri selain lebih efektif dan cepat juga menghasilkan keluaran beras yang lebih cantik dan pulen. Penggunaan mesin penggilingan padi di beberapa daerah agraris penghasil beras dianggap sangat penting. Dinas perdagangan menganggap penting pendistribusian bahan bakar solar bersubsidi pada para pelaku usaha penggilingan padi untuk mendukung pembinaan usaha mikro dan kecil tersebut.

Subsidi solar pada dasarnya akan mengurangi biaya produksi. Proses pengurangan biaya produksi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing beras lokal ketika dipasarkan. Persaingan harga yang sangat ketat memungkinkan beras lokal untuk kalah bersaing. Secara kualitas, beras lokal bisa saja tidak berbeda dengan beras yang diproduksi di luar Kabupaten Aceh Barat. Proses distribusi termasuk rantai pasok yang cukup panjang pada dasarnya bisa menjadi nilai plus beras lokal untuk bersaing di pasar domestik. Hal ini lah yang kemudian perlu diperhatikan sehingga Disperindag Kabupaten Aceh Barat merasa penting untuk memperhatikan bagian hilir dari agro-industri ini.

Pemberian subsidi solar ini diharapkan akan dapat meningkatkan selisih keuntungan dari tiap industri hilir penggilingan padi (Handoko & Patriadi, 2005). Subsidi yang tepat sasaran tentunya akan membantu para pihak yang memang membutuhkan. Subsidi diarahkan pada sisi produksi masyarakat dan bukan pada aspek konsumsi saja (Hottenrott et al., 2017; Xu et al., 2009). Rantai pasok yang jauh lebih pendek akan menjadi nilai

lebih tambahan untuk beras lokal bersaing dengan beras yang sengaja didatangkan dari luar daerah Aceh Barat.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi PDRB sebagai variable representatif pertumbuhan ekonomi, seperti halnya Teori Keynesian- perkembangan pendapatan secara nasional dipengaruhi oleh beberapa variable seperti tingkat pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, investai modal dan tenaga kerja, pengeluaran publik, investasi dan ekspor neto. Oleh karena itu Keynes menyatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diperkirakan oleh pertumbuhan pendapatan nasional dengan syarat harus terjadinya peningkatan permintaan pada sisi konsumen, pemerintah, investasi, dan net ekspor (Nopirin, 2011).

Subsidi dapat diartikan sebagai bantuan keuangan yang sengaja diberikan untuk meminimalisasi biaya tertentu pada suatu unit bisnis tertentu atau sektor ekonomi. Pemerintah mencabut sebagian besar porsi subsidi dikarenakan 70% dari subsidi yang diberikan jatuh ke tangan yang salah. Subsidi selama ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang nyatanya tidak pantas untuk menerima subsidi. Biosolar B30 sebagai salah satu bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah salah satu peruntukkannya berdasarkan Perpres No. 191 tahun 2014 adalah untuk usaha mikro, perikanan dan pertanian. Usaha pertanian yang dimaksud dalam peraturan tersebut memiliki kondisi luas lahan tidak lebih dari 2 hektar atau peternakan yang menggunakan mesin pertanian. Regulasi ini sengaja dibuat dan diawasi secara ketat mengingat banyaknya kebocoran distribusi bahan bakar ke pelaku usaha yang seharusnya tidak menerima subsidi. Biosolar sendiri adalah bahan bakar campuran dari minyak fosil dengan FAME dengan perbandingan 7:3.

Subsidi dapat dipahami dalam kerangka klasik *Public Service Obligation* (PSO). Kerangka ini menerima kritik *New Public Service* (NPS) dimana keterlibatan publik masyarakat dengan pemerintah lebih diarahkan untuk proses demokratisasi pelayanan publik. *The New Public Service* telah memperjuangkan visi manajer publik sebagai wirausahawan dalam konteks pemerintahan yang lebih segar, lebih ramping, dan semakin diprivatisasi. Konteks layanan yang diberikan baik oleh Disperindag dan layanan publik lainnya tidak hanya meniru praktik bisnis tetapi juga nilai-nilai bisnis (Denhardt & Denhardt, 2000; Zhang et al., 2017). Manajemen layanan umum telah mengalami revolusi. Fokus layanan tidak lagi ditekankan pada titik pengendalian birokrasi dan penyampaian layanan saja, administrator publik dalam hal ini para ASN perlu untuk pro-aktif menanggapi peringatan untuk “mengarahkan daripada sekedar mendayung” dan menjadi entrepreneur dalam model pemerintahan baru yang lebih ramping dan semakin diprivatisasi (Denhardt & Denhardt, 2000; Rice, 2007). Akibatnya, sejumlah perubahan yang sangat positif telah diterapkan di sektor publik. Fokus pada cultural competence dan budaya dalam layanan umum di Indonesia berkembang sangat lambat dan oleh karena itu konsepnya belum diterima dan dipahami dengan jelas oleh komunitas pelayanan masyarakat serta administrator pelayanan publik (Ismail, 2019; Komara, 2019).

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah (Handoko & Patriadi, 2005; Munawar, 2014). Subsidi sendiri merupakan pajak negatif yang justru menambah pendapatan bagi para penerimanya (Munawar, 2014; Takalo et al., 2013; Zhang et al., 2017). Subsidi BBM yang diberikan kepada para pelaku industri mikro di wilayah Aceh Barat termasuk subsidi yang innatura (In Kind Subsidy) karena para pelaku usaha diberikan langsung secarik surat untuk ditukarkan pada jenis BBM Biosolar yang digunakan untuk proses produksi mereka. Subsidi juga dapat dianggap sebagai penghalang perdagangan yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor (Munawar, 2014; Sahlman, 1990; Zhang et al., 2017). Subsidi pemerintah dapat dianggap sebagai variabel endogen dan mempelajari cara mengaturnya secara optimal skema subsidi untuk mempromosikan pembangunan dan mencapai tujuan subsidi pemerintah (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Takalo et al., 2013).

Model Duopoly Usaha Disubsidi dan Non-Subsidi

Perspektif duopoly dalam analisa permainan Stackelberg, yang melibatkan pemerintah, produsen dan konsumen sebagai pemain (Mason & Jayne, 2013; Xu et al., 2009). Pemerintah bertindak sebagai pemimpin Stackelberg yang akan memilih di antara beberapa subsidi yang mungkin akan diberikan pada para pelaku usaha untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial (Hottenrott et al., 2017; Jayne & Rashid, 2013; Li et al., 2020). Pemerintah juga memilih tingkat subsidi yang sesuai untuk ditawarkan kepada produsen atau konsumen produk (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Takalo et al., 2013). Oleh karena itu, produsen memutuskan tingkat produksi produk (dilambangkan sebagai $e > 0$) serta harga eceran produk (dilambangkan sebagai pg) dan produk pesaing (dilambangkan sebagai pn). Setelah itu, konsumen membuat keputusan pembelian; akibatnya permintaan tercapai (Chen et al., 2019; Kashyap et al., 2021; Takalo et al., 2013).

Subsidi sebagai Kebijakan Ekonomi

Sebuah kebijakan ekonomi yang signifikan akan memiliki dampak yang umumnya cukup besar dan akan mempengaruhi sektor tertentu yang menjadi objek kebijakan itu (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Takalo et al., 2013). Faktanya, keberadaan subsidi semacam itu adalah definisi yang baik dari signifikansi kebijakan (Hoekman & Nelson, 2020; Li et al., 2020; Mason & Jayne, 2013). Jika kita ingin menelusuri efek kebijakan atau mengidentifikasi kebijakan yang optimal, diperlukan kerangka kerja yang mengakui saling ketergantungan pasar (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Mason & Jayne, 2013; Xu et al., 2009). Subsidi dibangun di atas keseimbangan umum tradisional teori ekonomi kesejahteraan untuk menghasilkan kerangka kerja yang sederhana, namun kuat, untuk mengorganisir analisis kebijakan ekonomi (Jayne & Rashid, 2013; Mason et al., 2013; Zhang et al., 2017).

Tujuan non-ekonomi secara inheren lebih rumit karena menyiratkan tujuan yang keberadaannya tidak dapat diamati dengan cara orde pertama (Bown & Hillman, 2019; Chen et al., 2019; Shadikhodjaev, 2021). Pemerintah mungkin memiliki tujuan pendapatan, atau tujuan distribusi pendapatan, atau tujuan pertahanan nasional, tetapi besarnya tujuan itu belum lagi tujuan itu sendiri dan hubungannya untuk tujuan lain yang tidak memiliki ukuran yang jelas (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Hoekman & Nelson, 2020; Mietzner, 2015). Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tujuan seperti itu kurang penting untuk program pemerintah tertentu, atau masyarakat, dari tujuan ekonomi. Selain itu, kebijakan yang diberikan dapat berpindah dari satu kategori ke kategori lainnya (Hoekman & Nelson, 2020; Jayne & Rashid, 2013). Ekonomi awal antitrust, memberikan analisa ekonomi yang difokuskan pada ukuran (struktur) yang cukup konsisten dalam implikasinya dengan kepentingan pusat di kekuatan pasar (Hoekman & Nelson, 2020; Mason & Jayne, 2013; Munawar, 2014). Hal ini menyebabkan kesediaan, meskipun tentu saja diperebutkan, untuk memasukkan analisis ekonomi dalam politik regulasi antitrust (Bown & Hillman, 2019; Shadikhodjaev, 2021). Antitrust semakin dilihat terutama tentang efisiensi ekonomi (Hottenrott & Lopes-Bento, 2014; Takalo et al., 2013). Hal ini pada gilirannya mempengaruhi pandangan penegakan antitrust yang diambil oleh mereka yang bertanggung jawab atas implementasi (Hoekman & Nelson, 2020; Mason et al., 2013).

Untuk mengilustrasikan logikanya maka perlu untuk mempertimbangkan kasus ekonomi terbuka yang sederhana. Karena tarif setara dengan subsidi produksi dan pajak konsumsi pada tingkat yang sama maka jika tujuannya berkaitan dengan struktur produksi atau konsumsi secara eksklusif, campuran pajak dan subsidi (Bown & Hillman, 2019; Kashyap et al., 2021; Mason & Jayne, 2013; Takalo et al., 2013) yang ditargetkan hanya pada konsumsi atau campuran pajak dan subsidi yang ditargetkan hanya pada produksi umumnya akan lebih disukai daripada tarif karena penggunaan kebijakan perdagangan melibatkan biaya tambahan yang terkait dengan efeknya di sisi lain pasar (Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Hottenrott & Lopes-Bento, 2014; Takalo et al., 2013). Ini adalah dasar dari preferensi teoritis untuk subsidi yang secara luas dicatat dalam literatur hukum dan ekonomi perdagangan tentang subsidi (Bown & Hillman, 2019; Shadikhodjaev, 2021). Ketika memikirkan kebijakan yang optimal, tingkat intervensi sama pentingnya dengan pemilihan instrumen (Acharya & Sadath, 2017; Shadikhodjaev, 2021). Menyetel ini terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengurangi tingkat kepuasan fungsi tujuan di bawah apa yang akan muncul tanpa intervensi (Kashyap et al., 2021; Shadikhodjaev, 2021).

Alasan umum untuk dukungan pemerintah terhadap subsidi bertumpu pada anggapan bahwa insentif (atau kemungkinan) sektor swasta untuk berinvestasi tidak cukup dari sudut pandang kesejahteraan social (Acharya & Sadath, 2017; Czarnitzki & Lopes-Bento, 2013; Mason & Jayne, 2013). Pemerintah biasanya melengkapi subsidi sektor swasta dengan berinvestasi di public sektor penelitian seperti universitas atau dengan menawarkan kontrak pengembangan yang cenderung lebih berorientasi pada misi. Selain itu, pemerintah menyediakan dana subsidi kepada perusahaan sektor swasta melalui langsung hibah yang berkontribusi langsung pada biaya perusahaan dari proyek usaha (Kashyap et al., 2021; Shadikhodjaev, 2021). Di sebagian besar negara hal ini adalah instrumen utama untuk merangsang sektor swasta kegiatan inovasi. Sementara hibah tersebut biasanya tidak membedakan antara penelitian dan pengembangan, bagian ini membahas mengapa optimal untuk menargetkan skema subsidi berbasis hibah jenis proyek.

Heterogenitas kegiatan dalam proses subsidi ini tampak masuk akal bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kekhususan ini ketika merancang alat kebijakan inovasi. Kesesuaian yang lebih sulit dengan kondisi dan limpahan keluar yang lebih tinggi, mahal atau bahkan terbatas akses ke keuangan eksternal untuk kegiatan produksi juga kemungkinan kegagalan pasar menjadi lebih besar untuk pemberian usaha yang bersubsidi daripada untuk kegiatan pengembangan. yang optimal tingkat subsidi untuk proyek-proyek penelitian akibatnya harus lebih tinggi dari untuk proyek-proyek pembangunan dan efek tambahan yang diharapkan dari mensubsidi kedua jenis kegiatan mungkin berbeda.

Mempromosikan akses masyarakat ke sumber subsidi telah berlangsung lama perhatian kebijakan di Indonesia. Untuk sebagian besar sejarahnya, distribusi subsidi di Indonesia dikendalikan oleh pemerintah. Beban keuangan dan inefisiensi public program mendorong legalisasi perdagangan di awal 1960-an. Namun, hampir terus menerus selama proses liberalisasi jangka waktu, berbagai jenis kredit pemerintah dan/ atau program subsidi input telah beroperasi bersama yang muncul sistem distribusi swasta. Mulai tahun 1993, pemerintah agen swasta yang ditunjuk untuk mendistribusikan subsidi ke masyarakat miskin petani dan mengembalikan pinjaman setelah panen. Di setiap tahun tingkat pemulihan pinjaman tidak pernah lebih tinggi dari 43% dan biasanya di bawah 30% (Govereh et al., 2002).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini data subsidi solar digunakan sebagai input variabel tidak bebas dalam analisis regresi logistik biner. Dalam data tersebut aspek persepsi keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha penggilingan padi diperhitungkan dalam analisis. Responden pada penelitian diambil seluruhnya dari data rekomendasi penerima BBM Biosolar yang secara demografi deskriptif, responden penelitian tersusun pada Tabel 1.

Tabel 1. Demografi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
Pria	59	93,65%
Wanita	4	6,35%
Kode KLBI		
10631	23	36,51%
23921	12	19,05%
45202	11	17,46%
10761	9	14,29%
10772	8	12,70%
Alamat Usaha		
Woyla	16	25,40%
Kaway XVI	11	17,46%
Samatiga	9	14,29%
Bubon	6	9,52%
Arongan Lambalek	7	11,11%

Woyla Timur	5	7,94%
Woyla Barat	4	6,35%
Meureubo	1	1,59%
Sungai Mas	2	3,17%
Alue Sikaya	1	1,59%
Johan Pahlawan	1	1,59%
Total	63	100%

Hal ini kemudian ditetapkan dengan nilai bobot dilakukan berdasarkan data yang ada dan tidak menggunakan metode konvensional dimana bobot sudah ditetapkan sebelumnya. Regresi logistik biner dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \alpha + \beta_x + \dots + \beta_n x_n$$

Analisis faktor dilakukan dengan cara rasional sebelumnya dilakukan dengan mengurutkan parameter subsidi BBM Biosolar berdasarkan parameter yang paling berpengaruh terhadap dasar pemberian subsidi tersebut. Pemberian bobot ternormalisasi terhadap masing-masing parameter subsidi BBM Biosolar dihitung melalui persamaan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W_{ij} = \frac{n - r_j + 1}{\sum(n - r_j + 1)}$$

Pada penelitian ini analisis data regresi logistik biner dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25 for Windows yang menghasilkan nilai koefisien variabel (β) yang dijabarkan pada pada Tabel 1. Nilai koefisien variabel (β) tersebut digunakan untuk menginterpretasi hasil analisis. Hasil regresi logistik biner di SPSS menunjukkan bahwa pemberian subsidi BBM Biosolar dipengaruhi oleh 4 paramater. Nilai koefisien tertinggi yaitu sebesar 0.542. Nilai positif berarti proses pemberian subsidi BBM Biosolar dipengaruhi terutama oleh luas lahan yang tidak lebih dari 2 hektar dan penggunaan mesin industri pada proses penggilingan gabah menjadi beras. Seluruhnya memunculkan persepsi keuntungan bagi para pengusaha penggilingan padi dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai koefisien variabel (β) regresi logistik

Parameter variable bebas	Nilai koefisien variabel (β)
Luas lahan	0.529
Persepsi biaya	0.441
Persepsi pendapatan	0.632
Jumlah kebutuhan subsidi	0.346
Akurasi (ROC)	0.773

Hasil dari analisis regresi logistik diuji ketepatannya dengan menggunakan metode ROC (*Relative Operating Characteristic*). Nilai ketepatan ini biasanya berada diantara 0.5 sampai 1.0. Pada analisis rasional, penetapan urutan parameter berpengaruh terhadap nilai bobot. Berdasarkan studi literatur dan dokumen terhadap proses penyaluran dan penetapan penerima bantuan Biosolar selama ini, didapat kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh bidang usaha mikro yang menggunakan mesin produksi mini akan menerima bantuan subsidi solar dengan jumlah yang telah ditetapkan. Selanjutnya pemilik usaha akan terus memperbaharui surat permohonannya dalam tenggat waktu tertentu hingga tingkat pemberian distribusi subsidi optimal. Analisis faktor yang dilakukan dengan cara statistik dan rasional menghasilkan tiga persamaan yang berbeda. Adapun persamaan hasil analisis faktor dengan cara statistik dan rasional disajikan adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = -6,783 + 0,891 (LL) + 0,123 (PB) + 0,555 (PP) - 0,309(JKS)$$

Dimana: LL: Luas Lahan, PB: Persepsi Biaya, PP: Persepsi Pendapatan dan JKS: Jumlah Kebutuhan Subsidi. Nilai koefisien determinasi antara kelas persepsi keuntungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi

Persepsi Keuntungan	Kelas	Koefisien Determinan R^2, y
Untung kecil	1	$y = 0,013x + 0,102$
Untung menengah	2	$R^2 = 0,771$
Untung besar	3	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis faktor menggunakan regresi logistik biner dan rasional menunjukkan bahwa persepsi pendapatan merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persepsi keuntungan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter yang terbesar pada ketiga persamaan (0.632 pada hasil SPSS). Nilai koefisien (β) positif tertinggi menunjukkan bahwa persepsi pendapatan merupakan dasar bagi persepsi keuntungan usaha yang disokong dengan luas lahan. Menurut penerima subsidi justru jumlah kebutuhan subsidi masih diasumsikan negative terhadap persepsi keuntungan dikarenakan masih jauh dari angka kebutuhan secara keseluruhan bahan bakar bagi usaha. Hal ini juga diimbuh dengan kenyataan bahwa bahan bakar biosolar yang diberikan diangkut dari jarak yang cukup jauh dari lokasi usaha mereka, sehingga pada dasarnya pada proses pengambilan biosolar yang disubsidi oleh Disperindag, para pelaku usaha sudah lebih dulu harus mengeluarkan biaya.

Persepsi pelaku usaha terhadap kurang ditunjukkan dengan nilai koefisien (β) positif terendah dan persamaan yang negative. Hal ini kemudian dapat disimpulkan bahwa subsidi yang diberikan ditanggapi dengan cukup sinis karena diberikan dengan setengah hati. Hal juga perlu menjadi dasar untuk memperbaiki proses pengelolaan dan pendistribusian biosolar bersubsidi kepada para pelaku usaha sehingga dapat mencerminkan citra yang positif bagi para pelaku usaha itu kedepannya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan akses ke masyarakat, dengan adanya bantuan subsidi dapat meningkatkan persepsi keuntungan terkhususkan bagi pelaku usaha utamanya industri penggilingan padi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengendalian distribusi subsidi agar penyaluran subsidi di masa yang akan datang lebih tepat sasaran. Hal ini juga menjadi acuan bahwa jumlah subsidi BBM Biosolar yang diberikan pemerintah dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan pelaku usaha mikro kedepannya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Subsidi solar sangat penting bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Aceh Barat. Kawasan ini merupakan sentra pertanian dan industri yang mengalami kesulitan dimana semuanya tergantung dari pendapatan dalam segi pertanian dan perikanan. Kedua proses tersebut saat ini sangat mendukung mesin produksi yang digerakkan oleh e-engine bertenaga diesel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana persepsi penerima subsidi dalam menerima subsidi itu sendiri. 63 sampel penelitian ini diambil dari database Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penerima subsidi solar milik Disperindag Kabupaten Aceh Barat. Dari hasil penyebaran diketahui bahwa subsidi yang diberikan masih dianggap kurang dan perlu ditingkatkan dan penerima subsidi menyatakan besarnya penghasilannya sebagai dasar dari manfaat yang diterimanya.

REFERENSI

Acharya, R. H., & Sadath, A. C. (2017). Implications of energy subsidy reform in India. *Energy Policy*, 102(March 2016), 453–462. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.036>

- Bown, C. P., & Hillman, J. A. (2019). WTO'ing a Resolution to the China Subsidy Problem. *Journal of International Economic Law*, 122(4), 557–578. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz035>
- Chen, J. Y., Dimitrov, S., & Pun, H. (2019). The impact of government subsidy on supply Chains' sustainability innovation. *Omega (United Kingdom)*, 86, 42–58. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.06.012>
- Czarnitzki, D., & Lopes-Bento, C. (2013). Value for money? New microeconomic evidence on public R&D grants in Flanders. *Research Policy*, 42(1), 76–89. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.04.008>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Handoko, R., & Patriadi, P. (2005). Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 9(4), 42–64.
- Acharya, R. H., & Sadath, A. C. (2017). Implications of energy subsidy reform in India. *Energy Policy*, 102(March 2016), 453–462. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.036>
- Bown, C. P., & Hillman, J. A. (2019). WTO'ing a Resolution to the China Subsidy Problem. *Journal of International Economic Law*, 122(4), 557–578. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz035>
- Chen, J. Y., Dimitrov, S., & Pun, H. (2019). The impact of government subsidy on supply Chains' sustainability innovation. *Omega (United Kingdom)*, 86, 42–58. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.06.012>
- Czarnitzki, D., & Lopes-Bento, C. (2013). Value for money? New microeconomic evidence on public R&D grants in Flanders. *Research Policy*, 42(1), 76–89. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.04.008>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Handoko, R., & Patriadi, P. (2005). Evaluasi Kebijakan Subsidi Non BBM. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 9(4), 42–64.
- Hoekman, B., & Nelson, D. (2020). Rethinking international subsidy rules. *World Economy*, 43(12), 3104–3132. <https://doi.org/10.1111/twec.13022>
- Hottenrott, H., & Lopes-Bento, C. (2014). (International) R&D collaboration and SMEs: The effectiveness of targeted public R&D support schemes. *Research Policy*, 43(6), 1055–1066. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.01.004>
- Hottenrott, H., Lopes-Bento, C., & Veugelers, R. (2017). Direct and cross scheme effects in a research and development. *Research Policy*, 46(6), 1118–1132. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.04.004>
- Ismail, N. (2019). Merit System Dalam Mewujudkan Transparansi Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 33. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2023>
- Jayne, T. S., & Rashid, S. (2013). Input subsidy programs in sub-Saharan Africa: A synthesis of recent evidence. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 44(6), 547–562. <https://doi.org/10.1111/agec.12073>
- Kashyap, A. K., Kovrijnykh, N., Li, J., & Pavlova, A. (2021). The benchmark inclusion subsidy. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 756–774. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.021>
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 4(1), 73–84. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>
- Li, Y., Tong, Y., Ye, F., & Song, J. (2020). The choice of the government green subsidy scheme: innovation subsidy vs. product subsidy. *International Journal of Production Research*, 58(16), 4932–4946. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1730466>
- Mason, N. M., & Jayne, T. S. (2013). Fertiliser subsidies and smallholder commercial fertiliser purchases: Crowding out, leakage and policy implications for Zambia. *Journal of Agricultural Economics*, 64(3), 558–582. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12025>
- Mason, N. M., Jayne, T. S., & Mofya-Mukuka, R. (2013). Zambia's input subsidy programs. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 44(6), 613–628. <https://doi.org/10.1111/agec.12077>
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610. <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991>
- Munawar, D. (2014). *Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*.
- Rice, M. F. (2007). A post-modern cultural competency framework for public administration and public service delivery. *International Journal of Public Sector Management*, 20(7), 622–637. <https://doi.org/10.1108/09513550710823524>
- Sahlman, W. A. (1990). The structure and governance of venture-capital organizations. *Journal of Financial Economics*, 27(2), 473–521. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(90\)90065-8](https://doi.org/10.1016/0304-405X(90)90065-8)

- Shadikhodjaev, S. (2021). The WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and Unilateralism of Special Economic Zones. *Journal of International Economic Law*, 24(2), 381–402. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab013>
- Takalo, T., Tanayama, T., & Toivanen, O. (2013). Market failures and the additionality effects of public support to private R&D: Theory and empirical implications. *International Journal of Industrial Organization*, 31(5), 634–642. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2013.02.002>
- Xu, Z., Burke, W. J., Jayne, T. S., & Govereh, J. (2009). Do input subsidy programs “crowd in” or “crowd out” commercial market development? Modeling fertilizer demand in a two-channel marketing system. *Agricultural Economics*, 40(1), 79–94. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00361.x>
- Zhang, M. M., Zhou, D. Q., Zhou, P., & Chen, H. T. (2017). Optimal design of subsidy to stimulate renewable energy investments: The case of China. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 71(November), 873–883. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.115>